



# Diplomasi Pertahanan Malaysia di Laut Cina Selatan: Isu dan Tantangan

(Malaysia's Defense Diplomacy in the South Cina Sea: Issues and Challenges)

Eryn Sobarini, Fildzah Suri Amalia, Maharani Nurmala,  
Moh Abdusy Syukur, Raka Gusfi Wisesa  
Universitas Pertahanan Indonesia

Corresponding Author: [erynsobarini@gmail.com](mailto:erynsobarini@gmail.com)

## *Abstract*

*The South hCina Sea dispute has escalated since Cina claimed 80% of the South Cina Sea area. This is conflicted with the interests of many countries, one of which is Malaysia. Cina's claims regarding Malaysia's EEZ area that can endanger Malaysia's national interests. In addition, the United States is also involved in this region and threats to Malaysia come from all sides. This can be a threat to Malaysia's national interest Malaysia is a small country that is building its military strength and relies heavily on trade. In overcoming this threat in the South Cina Sea, Malaysia seeks to increase mutual trust with related countries, especially Cina and Malaysia as major countries involved in the SOUTH CINA SEA region. Malaysia is also consistent in carrying out its foreign policy and actively promotes security in the South Cina Sea with ASEAN through ASEAN Plus One, ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS), ASEAN Defense's Minister Meeting/ASEAN Defense's Minister Meeting-Plus (ADMM/ADMM-Plus) and track II workshops. ASEAN has the same view, which is not agreeing to Cina's claims in the South Cina Sea.*

**Keywords:** *Malaysia, South Cina Sea dispute, Issues, Challenges, and ASEAN*

## **1. Pendahuluan**

Laut Cina Selatan merupakan sebuah kawasan yang meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran



Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan (Roza, Nainggolan, & Muhamad, 2013). Karena bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara, seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang strategis, yang kaya sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di Laut Cina Selatan bukan hanya sebatas minyak bumi, gas alam dan bahan mineral lainnya saja, sumber daya laut yang dihasilkan juga sangat melimpah, laut ini terkenal dengan berbagai macam jenis ikan (Kusumah, Supriatna, & Kusmarni, 2018). Selain kaya akan sumber daya alam, kawasan Laut Cina Selatan juga memiliki fungsi sebagai jalur perdagangan internasional yang menyebabkan negara-negara maju menjadikan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan menjadi prioritas dalam kepentingan politik luar negerinya.

Akar dari konflik Laut Cina Selatan dimulai ketika klaim pertama kali pada tahun 1947 oleh Cina yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda *nine dash line* di seputar wilayah itu (Akmal & Pazli, 2016). Klaim mutlak atas seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan, yang dilancarkan pemerintah Cina telah memunculkan kekhawatiran *claimant states* dan *non-claimant states* di sekitarnya, serta negara luar kawasan atas masa depan kontrol, stabilitas, dan keamanan wilayah perairan di sana. Kekhawatiran yang meningkat kemudian telah memicu eskalasi ketegangan, akibat muncul manuver-manuver militer dan upaya saling unjuk kekuatan angkatan bersenjata dan upaya provokasi dan intimidasi di perairan dan arena diplomasi. Selanjutnya diperlihatkan perilaku agresif dan beberapa upaya provokasi yang dilakukan angkatan laut Cina di wilayah perairan laut Cina Selatan, yang sudah mereka klaim secara mutlak, terhadap angkatan laut dan nelayan asal Filipina dan Vietnam, atau sebaliknya (Roza, Nainggolan, & Muhamad, 2013).



Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan yang melibatkan para *claimant states* diantaranya Cina, Taiwan, Brunei, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Muncul kemungkinan konflik bersenjata terbuka secara luas dengan intensitas tinggi (*high intensity conflict*), jika resolusi konflik permanen gagal ditemukan di Laut Cina Selatan, tidak hanya antara para *claimant states* tetapi juga dengan negara di luar kawasan yang memiliki kepentingan besar di perairan tersebut sekaligus merupakan aliansi dari sejumlah negara yang bersengketa (Marsetio, 2018). Ancaman yang dapat timbul dari kawasan Laut Cina Selatan ini menyebabkan negara-negara harus memiliki strategi di Laut Cina Selatan, terutama *claimant state*. Malaysia merupakan salah satu negara yang melakukan klaim di Laut Cina Selatan. Malaysia memiliki kepentingan terkait keamanan, sosial-politik, dan ekonomi di Selat Malaka hingga Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak). Aktivitas Cina dan keterlibatan negara-negara lain di kawasan Laut Cina Selatan akan menimbulkan berbagai isu dan tantangan bagi Malaysia. Tulisan ini akan membahas mengenai isu dan tantangan yang ada di Laut Cina Selatan. Pembahasan isu dan tantangan bagi Malaysia di Laut Cina Selatan merupakan salah satu dasar bagi Malaysia untuk menyusun strategi pertahanan negaranya.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Malaysia and South Cina Sea**

Hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika kita berbicara tentang Laut Cina Selatan, adalah sengketa. Ini adalah masalah terpenting sehubungan dengan Laut Cina Selatan, tidak hanya karena mengancam atau memberikan peluang untuk bentrokan secara militan, tetapi juga telah memberikan posisi politik yang sangat sulit di antara kekuasaan, tidak hanya di ASEAN dan Cina, tetapi telah menarik kekuatan regional ekstra lainnya seperti AS, Australia, India, Jepang, dll. Cina menyatakan bahwa klaimnya ini didasarkan pada sejarah (Harun, 2021).

Konflik Laut Cina Selatan mulai tereskalasi kala Cina mengklaim 80% wilayah laut tersebut sebagai teritorinya. Meski tak sesuai dengan UNCLOS 1982, Cina mengeskpansi sejumlah kawasan di laut itu termasuk dengan memberdayakan militer dan penjaga pantai. Hal Ini membuat Cina kerap bersitegang dengan



sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei. Malaysia memandang persoalan Laut Cina Selatan seharusnya diselesaikan dengan aman berdasarkan prinsip undang-undang antar bangsa secara universal. Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut Cina Selatan secara konstruktif, menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai (Asmara, 2021).

Malaysia adalah salah satu dari beberapa negara Asia Tenggara yang mengklaim sebagian Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh Cina. Malaysia mengklaim kedaulatan lebih dari sepuluh atol di kepulauan Spratly, yang semuanya termasuk dalam ZEE 200 mil laut (nm). Pemerintah Malaysia tampaknya telah menyerahkan klaimnya pada fitur kesebelas, Louisa Reef, dalam perjanjian bilateral dengan Brunei pada tahun 2009 yang meniadakan batas maritim mereka. Berdasarkan prinsip rak kontinental, Kuala Lumpur juga mengklaim yurisdiksi atas fitur yang terendam, James Shoal (45 nm dari Sarawak), dan sekelompok fitur terendam dan semi-terendam secara kolektif dikenal sebagai Luconia Shoals (54 nm off Sarawak). Malaysia menempati lima atol di Spratly: Swallow Reef diduduki 1983; Mariveles Reef dan Ardasier Reef pada tahun 1986; dan Investigator Shoal dan Erica Reef pada tahun 1999. Ini juga telah menanam penanda kedaulatan pada dua fitur yang tidak ditempati, Dallas Reef (dekat dengan Ardasier Reef) dan Royal Charlotte Reef (dekat dengan Swallow Reef) (Storey, 2020). Berikut peta klaim Cina dan wilayah Malaysia yang terlibat.

### Peta Kepulauan Spratly



Sumber: Ruhanas Harun. 2021. *Malaysian Defence Diplomacy in the South Cina Sea : Issues and Challenges*.

Sejak akhir 1980-an, ketika Laut Cina Selatan muncul sebagai masalah keamanan yang serius, Malaysia secara konsisten mengikuti kebijakan yang sama, dengan hanya kalibrasi ulang kecil. Kebijakan itu terdiri dari tiga elemen. *Elemen pertama* adalah melindungi kedaulatan teritorial negara dan hak berdaulat dalam ZEE-nya. Fitur-fitur yang diklaim Malaysia dekat dengan Sarawak dan Sabah, dan perairan di kedua negara bagian ini menjadi tuan rumah bagi perikanan dan endapan hidrokarbon yang signifikan. Yang terakhir sangat penting bagi Kuala Lumpur sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan. *Elemen kedua* adalah menegakkan hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi dan "overflight". Sebagai negara kecil, Malaysia adalah advokat kuat hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Malaysia mendukung arbitrase internasional untuk menyelesaikan klaim teritorial dan yurisdiksi yang bertentangan, dan telah berpartisipasi dalam tiga kasus besar dengan Indonesia dan Singapura, dan mematuhi putusan tersebut. Ketika majelis arbitrase mengeluarkan putusannya tentang kasus Filipina versus Cina pada 12 Juli 2016, Malaysia mengeluarkan pernyataan yang mencatat bahwa sengketa Laut Cina Selatan harus diselesaikan secara damai melalui "penghormatan penuh terhadap



proses hukum dan diplomatik" termasuk UNCLOS. Pemerintah Malaysia telah sepenuhnya sesuai dengan putusan majelis bahwa sembilan garis putus-putus Cina tidak kompatibel dengan UNCLOS. Malaysia tidak mengakui garis sembilan putus-putus tersebut dan karena itu tidak ada klaim yang tumpang tindih antara kedua negara. *Elemen ketiga* adalah mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Sebagai negara perdagangan utama, kemakmuran ekonomi Malaysia bergantung pada aliran bebas perdagangan maritim melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Pentingnya, jalur komunikasi laut yang melewati Laut Cina Selatan menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Malaysia Timur (Harun, 2021).

Malaysia telah memilih untuk mengurangi perselisihan ini demi kepentingan memajukan hubungan positif dengan Cina, khususnya secara ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir Malaysia juga telah meningkatkan hubungan politik dan militernya dengan AS; kedua negara telah lama menikmati ikatan ekonomi yang kuat. Kebijakan Malaysia dengan demikian dapat dipandang sebagai mencari keseimbangan antara kedua kekuatan besar-meningkatkan hubungan ekonomi dengan Cina mengurangi ketergantungan ekonomi Malaysia pada AS, sementara hubungan politik dan militer yang lebih kuat dengan AS membantu melindungi nilai terhadap dominasi Cina di Asia Tenggara. Malaysia akan terus mempromosikan hubungan bilateral yang kuat dengan kedua negara, mempromosikan hubungan mereka dengan ASEAN, dan terus mempromosikan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara multilateral melalui ASEAN (Finkbeiner, 2013).

Malaysia telah menerapkan diplomasi pertahanannya tidak hanya melalui ADMM, tetapi juga SOM. Melalui diplomasi pertahanan, memungkinkan negara-negara untuk membatasi kegiatan agresifnya dan juga perangkat "menyelamatkan wajah" yang sangat penting bagi negara kecil. Malaysia juga mengesampingkan pengajuan klaimnya yang tumpang tindih dengan Cina ke arbitrase internasional, karena itu berarti bahwa Malaysia harus bernegosiasi dengan Cina *1-on-1*, dimana negara-negara penuntut di ASEAN ragu untuk melakukannya karena akan



melemahkan posisi negara mereka. Malaysia memproyeksikan negara mereka sebagai netral dalam masalah ini dengan menyeimbangkan kritik terhadap Cina dengan mempertanyakan kegiatan AS di daerah itu juga. Saat ini, Malaysia melanjutkan kebijakannya untuk mencoba mengakomodasi, menyeimbangkan kepentingannya, berbicara dengan lembut, tetapi adakalanya memungkinkan untuk meninggikan suaranya, dan mencoba menjauh dari potret dan kecurigaan berperilaku seperti "saudara kecil" ke "sang naga" (Harun, 2021).

Malaysia percaya bahwa kepentingan ekonomi, hubungan ekonomi dapat mengikat bangsa-bangsa bersama-sama. Malaysia dalam beberapa waktu terakhir, telah mengusulkan apa yang disebut dengan "*prosper*" oleh kebijakan negara tetangga. Ini berarti Malaysia berbagi "buah" pengembangan perekonomian yang baik. Untuk itu, Malaysia telah mengembangkan strategi pembangunan ekonomi multilateral, baik di darat maupun laut. Bagi bangsa yang bergantung pada perdagangan, pada ekonomi internasionalnya, cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan negara atau wilayah apa pun atau bagian dari dunia ini yang akan berkontribusi pada itu. Satu-satunya rute pelarian yang Malaysia miliki, adalah meminimalkan permusuhan dan permusuhan, karena pada akhirnya itulah yang menjadi tujuan utama diplomasi (Harun, 2021).

## **2.2. Malaysia's Strengths and Weaknesses**

Asia Tenggara terdiri dari beberapa negara yang rata-rata meraih kemerdekaannya sekitar era 1950 hingga 1960-an. Hal ini sangat mempengaruhi bangsa di Asia Tenggara untuk lebih meningkatkan militer dan pertahanannya sejalan menggunakan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka menjamin stabilitas ekonomi. Perkembangan ini secara tidak eksklusif pula mempengaruhi Malaysia, menjadi negara yang secara aktif sudah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan memperkuat pertahanan militer dan nasionalnya.



Malaysia memang tidak pernah menjadi negara yang mengandalkan kekuatan militer, namun bukan berarti Malaysia mengabaikan pembangunan militer dan pertahanannya. Di sisi lain, pembangunan militer selalu berjalan beriringan dengan aspek-aspek lain dari pembangunan suatu bangsa. Namun, proses pembangunan militer Malaysia membutuhkan strategi pembangunan militer yang dapat memberikan dampak pertahanan dan keamanan nasional yang optimal atau maksimal dengan biaya yang minimal. Pertahanan Malaysia sejak tahun 1957 ini sangat bergantung pada kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Malaysia hingga benar-benar terbentuk pada Era Pemerintahan Tun Mahathir pada awal 1990-an.

Letak Malaysia yang berada dekat bahkan berbatasan langsung dengan negara lainnya dapat dijadikan kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki. Jika mengambil sisi negatifnya, tentu saja dapat menjadi kelemahan karena potensi ancaman yang akan terjadi menjadi lebih banyak dan beragam. Terlebih lagi negara yang berbatasan sangat dekat dengan Malaysia, yaitu Singapura sudah dapat dikatakan sebagai negara maju yang mempunyai pertahanan lebih canggih dan ekonomi yang jauh lebih baik dari Malaysia. Wilayah regional yang dianggap penting oleh Malaysia termasuk SA, termasuk Kepulauan Andaman dan Laut Cina Selatan. Malaysia memandang setiap pembangunan di kawasan juga akan mempengaruhi keamanan serta perkembangannya. Ini penting karena Malaysia berbagi perbatasan darat atau laut atau keduanya dengan hampir setiap negara yang menjadi anggota ASEAN. Setiap gangguan atau campur tangan di wilayah ini, baik berupa konflik internal wilayah atau bahkan konflik eksternal wilayah, keduanya akan mempengaruhi keamanan nasional (Keling, 2011). Kelemahan lain yang sekiranya dimiliki oleh Malaysia selain negaranya yang kecil adalah Malaysia tidak mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpah ruah seperti yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga untuk mencukupi seluruh kebutuhan nasionalnya, Malaysia harus lakukan dengan cara berdagang.





Sejak akhir 1980-an, kebijakan di Malaysia secara konsisten mengikuti kebijakan yang sama, unsur-unsurnya adalah:

- a) Melindungi kedaulatan teritorial dan hak berdaulat Malaysia di ZEE-nya.
- b) Menegakkan hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan.
- c) Mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Untuk mencapai hal-hal tersebut, Malaysia melakukan beberapa cara atau strategi, diantaranya adalah:

1. Menegakkan dan mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya. Pada hal ini termasuk juga memperkuat kemampuan pertahanannya, penempatan personel militer di 5 atol yang telah disebutkan di atas, dan TLDM, TUDM, APMM melakukan patroli rutin di ZEE untuk memantau aktivitas Cina.
2. Melindungi hubungan ekonomi dari sengketa Laut Cina Selatan. Malaysia tidak menganggap Cina sebagai ancaman, karena Cina merupakan *partner* dagang atau ekonomi terbesar untuk Malaysia dan Malaysia juga menghindari tanggapan militer terhadap serangan Cina untuk menjaga hubungan persahabatan.
3. Malaysia mendukung proses manajemen konflik. Deklarasi 2002 tentang Perilaku Para Pihak (DoC) di Laut Cina Selatan dan Kode Etik (CoC), mendukung pengembangan sumber daya bersama di wilayah yang disengketakan, dan tidak mengakui klaim *nine dash line* Cina.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Malaysia merupakan negara dagang. Tanpa perdagangan internasional, Malaysia tidak bisa makmur dan kelangsungan hidupnya akan dipertaruhkan. Untuk bangsa yang bergantung pada perdagangan, pada ekonomi internasionalnya, cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan tetap sedekat mungkin mempunyai hubungan ekonomi dengan negara atau wilayah atau bagian dunia mana pun yang akan berkontribusi untuk hal itu. Ini dapat dikategorikan sebagai kekuatan bagi Malaysia, karena tentu saja Malaysia



menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara besar yang dapat mencukupi kebutuhannya tersebut. Dengan menjalin hubungan banyak dengan banyak negara besar ini, tentu saja Malaysia mempunyai *mutual trust* yang tinggi dan mempunyai banyak aliansi. Bergabung dengan aliansi ini juga merupakan salah satu kelebihan dari Malaysia. Kita ambil saja contohnya dengan bergabungnya Malaysia sebagai anggota dari *Five Power Defence Agreements* (FPDA) bersama Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris. Hal ini dapat menjadi kelebihan dari negara Malaysia karena FPDA dapat menjadi tameng untuk Malaysia ketika mendapat serangan dari negara lainnya. Contohnya saja, jika sampai Indonesia menyerang Malaysia, besar kemungkinan negara kita akan dikeroyok oleh empat negara lainnya tersebut, terutama mungkin oleh Inggris yang dapat dikatakan sebagai “ibu” bagi Malaysia. Hal yang tidak bisa dilupakan juga adalah fakta bahwa Inggris merupakan anggota pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang bisa menyulitkan posisi Indonesia. Jadi, Malaysia didukung oleh negara “ibu”-nya yang merupakan sebuah negara besar.

### **2.3. Malaysia’s Opportunities and Threats**

Bila merujuk dalam sejarah dengan menganalisa perilaku Cina terhadap negara dan orang lain yang bervariasi sesuai dengan tingkat pengakuan orang lain tentang peran diri dan konsepsi tatanan dunia Cina. Sebagaimana istilah konsepsi peran diri adalah digunakan dalam pengertian studi klasik Holsti tentang konsepsi peran nasional, yaitu 'konsepsi ego sendiri tentang posisi dan fungsinya, dan perilaku yang sesuai' untuk mereka' (Holsti, 1970). Pemahaman ini mirip dengan 'identitas peran' seperti yang digunakan oleh Harnisch untuk 'konsepsi ... menyatakan tentang diri mereka sebagai pemain peran'. Mereka 'tidak mencakup' peran yang tepat karena identitas peran tidak mencakup harapan dan tindakan orang lain seperti itu (Harnisch, 2015).

Dalam konsepsi tatanan dunia ditegaskan, bahwa tatanan dunia tidak dapat dipahami secara independen dari konsepsi peran-diri, karena imajinasi peran-ego menciptakan peran-peran bersama sama dengan peran-peran, jaringan harapan



normatif, dan hubungan yang menghubungkan berbagai aktor. Dengan pertimbangan bahwa klaim Cina yang luas di Laut Cina Selatan mencakup hampir seluruh laut hanya beberapa mil di luar pantai Malaysia Timur, gerakan Cina di Kepulauan Paracel seharusnya dipandang dengan ketakutan oleh elit politik Malaysia (Ngeow Chow Bing: 2015).

Sebagaimana sejarah telah mencatat, bahwa, Malaysia telah memilih untuk mengabaikan tindakan Cina ini. Kurang dari tiga bulan setelah bentrokan bersenjata di Kepulauan Paracel, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak adalah pemimpin pertama yang memimpin negara-negara ASEAN untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Para pemimpin Malaysia menawarkan visi tentang kawasan yang jelas menarik bagi sisi Cina. Pada tahun 1971, Razak menggambarkan Cina dengan 'hak untuk memainkan peran' dalam urusan daerah yang sepadan dengan kepentingan dan martabatnya sebagai kekuatan utama dan hak untuk mengharapkan bahwa negara-negara di kawasan itu tidak bertindak dengan cara yang merugikan dia' (Tun Abdul Razak Bin Hussein: 1976).

Visi Razak juga sesuai dengan harapan Cina sejauh menentang 'aliansi keamanan dengan kekuatan-kekuatan besar yang tidak hanya menyeret negara-negara Asia Tenggara ke dalam konflik kekuatan eksternal tetapi yang lebih penting merusak hubungan satu sama lain hingga merugikan kawasan sebagai keseluruhan'(Tun Abdul Razak Bin Hussein: 1981). Akhirnya Razak berpendapat bahwa Asia Tenggara harus menjadi zona perdamaian dan netralitas yang 'dijamin oleh semua kekuatan besar', dengan demikian menempatkan Malaysia agak jauh dari konsep keamanan regional yang berpusat pada AS dan berbasis aliansi. Kredibilitas sikap ini digarisbawahi oleh non-aksesi Malaysia ke SEATO, serta dengan inisiatifnya untuk zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas untuk Asia Tenggara, dan peran aktifnya dalam GNB. Secara publik, Malaysia memilih swasembada nasional dengan penghormatan terhadap pertahanan nasional, dan kebijakan untuk mengisolasi kawasan dari persaingan negara adidaya.

Namun, Malaysia juga mencoba melakukan upaya melindungi nilai, dengan segala konsekuensi melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat, meskipun dalam sebuah cara yang tidak mencolok. Pada tahun 1975, saat berkunjung ke Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Malaysia Rithaudeen menunjukkan kepada Menteri Luar Negeri AS bahwa: 'Semacam asosiasi rahasia' bermanfaat bagi kami. Kami mencoba untuk mandiri dalam kebijakan luar negeri kami, tetapi ada hal-hal yang harus kita atur diam-diam.

Kerangka politik luar negeri Malaysia yang mandiri dan visi kawasan tangguh yang berusaha untuk menahan hegemoni di teluk sangat didukung oleh pihak Cina, dan dibingkai ulang sesuai dengan pemahaman Cina saat ini. Mengubah posisi masa lalunya, Cina secara eksplisit menolak pilihan untuk campur tangan dalam urusan internal Malaysia dalam membela kepentingan orang Tionghoa perantauan. Dalam Komunike Bersama, Cina menyatakan bahwa mereka 'tidak' mengakui kewarganegaraan ganda. Berangkat dari prinsip ini, pemerintah Cina menganggap siapa pun yang berasal dari Cina yang telah mengambil atas kemauannya sendiri atau memperoleh kewarganegaraan Malaysia, secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Cina.

Diprakarsai oleh kunjungan Abdul Razak ke Cina pada tahun 1974, kedua negara berhasil membangun praktik kunjungan tingkat tinggi yang sering dilakukan hingga saat ini. Itu tahun setelah pembentukan hubungan diplomatik melihat sejumlah pertemuan tingkat atas, yang paling menonjol adalah kunjungan Deng Xiaoping ke Malaysia pada tahun 1978 dan kunjungan timbal balik Perdana Menteri Malaysia Hussein Onn ke Beijing pada tahun 1979. Pada tahun 1981 Perdana Menteri Cina Zhao Ziyang mengunjungi Malaysia, diikuti pada tahun 1982 oleh orang asing Cina Menteri Wu Xueqian.

Terlepas dari hubungan yang harmonis secara keseluruhan, Malaysia tidak ragu-ragu untuk memajukan klaim teritorial yang mulai dipublikasikan pada tahun 1979 ketika pertama kali menerbitkan peta yang menggambarkan ZEE yang diklaim Malaysia. Pada tahun 1983 Malaysia menduduki pulau pertama di ZEE,



dan satu tahun kemudian Malaysia mengundang undang-undang ZEE-nya. Sementara tindakan ini menimbulkan protes diplomatik dari Cina dan diplomasi tingkat tinggi terus berlanjut. Menteri Luar Negeri Cina melakukan kunjungan ke Malaysia pada tahun 1984 dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir melakukan kunjungan ke Cina pada tahun 1985, dan diundang untuk memberikan pidato terkemuka di Universitas Tsinghua. Secara sadar atau tanpa sadar, dalam pernyataan mereka tentang hubungan Cina-Malaysia, para pemimpin Malaysia telah mengikuti gagasan Konfusianisme tentang 'harmoni tetapi bukan keseragaman' (*he er bu tong*), yang bertujuan pada 'interaksi yang didasarkan pada penghormatan (bukan kesepakatan dengan) mereka yang berbeda' dari kami' (Emilian Kavalski: 2013).

Pada kepemimpinan Mahathir Mohamad, Mahathir menjunjung kebijakan luar negeri independen tinggi Malaysia, penolakan sistem keamanan kolektif serta dukungan untuk prinsip-prinsip non-intervensi dan hidup berdampingan secara damai. Dia juga menonjol dalam gerakan untuk internasional baru tatanan ekonomi dan penguatan kerjasama Selatan-Selatan. Akhirnya, dia mendirikan dirinya sebagai kritikus terkemuka standar ganda Barat, organisasi internasional yang didominasi Barat, dan konsep dengan pretensi universal seperti hak asasi manusia dan demokrasi liberal.

Berkembangnya tata pemerintah dan kepemimpinan domestik Malaysia telah membangkitkan sikap dan kebijakan luar negeri yang semakin jelas terhadap sengketa di Laut Cina Selatan. Sikap Malaysia untuk mengklaim kedaulatan atas sejumlah pulau, termasuk 5 pulau/attols, yang didudukinya yang semuanya termasuk dalam ZEE 200 mil laut, Pemerintah Malaysia juga telah menempatkan personel militer di pulau-pulau ini. Malaysia pada akhirnya juga tidak mengakui klaim 9 garis putus-putus Cina. Namun karena berbagai alasan, Malaysia memilih untuk mengisolasi hubungan ekonomi (dengan Cina) dari sengketa Laut Cina Selatan, Sekaligus mendukung proses manajemen konflik di Laut Cina Selatan, melalui DoC dan CoC.



Sejak pemerintahan Mahathir Mohamad, pada akhir 1980an Malaysia secara konsisten telah mengikuti kebijakan pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama, diantaranya kebijakan dalam hal:

- a. Melindungi kedaulatan teritorial dan hak berdaulat Malaysia di ZEE-nya.
- b. Menegakkan hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan.
- c. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Meskipun Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi menegaskan kembali atas klaimnya di Laut Cina Selatan, namun tidak berkomentar secara terbuka tentang langkah-langkah Cina. Reaksi Malaysia adalah tanpa retorika politik yang akan mendefinisikan Cina sebagai kemungkinan ancaman. Juga, pilihan untuk beralih ke Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang dikesampingkan. Sebagai gantinya, Malaysia memilih untuk tetap pada garis kebijakan luar negerinya yang independen. Sementara kurangnya komentar publik dari elit Malaysia mungkin tampak aneh pada awalnya pemandangan, itu hanya kelanjutan dari pola yang dipamerkan pada tahun 1983, ketika sebuah rencana skuadron Cina berlayar ke James Shoal.

Sementara Vietnam melaksanakan protes pelanggaran kedaulatannya ini, justru Malaysia tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Pola serupa dapat diamati pada 1992, ketika wakil gubernur provinsi Hainan, di atas kapal perang Cina, melakukan sebuah 'inspeksi' dari James Shoal yang diklaim Malaysia, yang, bagaimanapun, tidak menghasilkan apapun reaksi publik Malaysia (See Huang and Shih). Bagi Malaysia keamanan terhadap sesuatu yang menimbulkan masalah keamanan adalah persaingan kekuasaan dan konflik kepentingan di laut seperti Laut Cina Selatan, di Selat Malaka, dan di Samudra Hindia di mana negara-negara memiliki kekuatan kompetisi. Jadi di bawah kondisi ini, menurut Profesor Ruhanas, pertahanan diplomasi akan memiliki peran aktif langsung. Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan memiliki ancaman yang memmicu negara-negara tidak



hanya di ASEAN tetapi juga negara-negara lain, yang pada gilirannya Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan dijadikan arena bermain yang panas.

Negara-negara lain kecuali ASEAN dan Cina akan terlibat karena beberapa alasan. Jepang memiliki besar kepentingan kawasan, maka Korea Selatan yang memiliki ekonomi industri akan pasti akan terlibat, dan Amerika Serikat, Indonesia dan Australia. Jika ada masalah di Laut Cina Selatan dan di Asia Tenggara negara-negara ini akan mendapatkan terlibat karena kepentingan yang lebih tinggi yang mereka miliki di wilayah tersebut. Terancam negara pada akhirnya harus menyeimbangkan kepentingan. Meski ada pilihan berupa bergabung, tetapi saat ini bukan pilihan di Laut Cina Selatan yang keduanya utama aktornya adalah Cina dan Amerika Serikat, tetapi akan lebih lagi jika di Tenggara Asia Negara-negara Asia tidak akan menghindari memihak, yang berarti bergabung, tetapi apa yang bisa mereka melakukan keseimbangan bunga atau lindung nilai.

Bagi Malaysia, dalam menghadapi ancaman yang muncul akibat ketegangan di antara keduanya negara-negara besar di Laut Cina Selatan, negara tersebut telah menetapkan prioritas strategis untuk mengelola masalah internasional, yaitu kesejahteraan negara tetangga yang diprakarsai oleh PM Mahatir ketika dia menjadi perdana menteri. Selain itu, Malaysia juga bekerja sama dengan negara tetangga terdekat. Malaysia harus memiliki kerjasama untuk stabilitas dan terutama kerjasama difokuskan pada Indonesia, Filipina atau Thailand dan Singapura yang berbatasan langsung. Sehingga menurut Profesor Ruhanas, kelembagaan ASEAN dengan ADMM dan ADMM Plus masih sangat penting dan relevan.

Sehubungan dengan pengakuan peran diri Cina dan konsepsi tatanan dunia, Malaysia tetap pada garis kebijakan luar negerinya yang mapan tanpa campur tangan bahkan setelahnya insiden Tiananmen tahun 1989. Pada tahun 1990, kira-kira enam bulan setelah pembantaian Tiananmen, Malaysia mencabut larangan lama kunjungan warga negara Malaysia ke Cina. Pada tahun yang sama, Kuala Lumpur menerima kunjungan kenegaraan Presiden Cina Yang Shangkun dan



Perdana Menteri Li Peng, di mana Perdana Menteri Malaysia Mahathir menekankan komitmen Malaysia pada prinsip hidup berdampingan secara damai dan tanpa campur tangan. Baginya Cina telah 'mendapat kepercayaan dari teman-teman dan pada saat yang sama hak untuk' menangani urusan internalnya sendiri. Oleh karena itu, insiden "4 Juni" [yaitu. pembantaian Tiananmen] tidak mempengaruhi hubungan Cina-Malaysia. (Mahathir Mohamad: 1990)

Sambil mendukung pemerintahan yang demokratis, Mahathir juga menjelaskan bahwa demokrasi harus dianggap sebagai sarana untuk akhir, dan bukan sebagai tujuan itu sendiri, yang digunakan oleh kekuatan Barat untuk menaklukkan 'mereka yang tidak' mematuhi interpretasi terbaru dari keyakinan demokrasi mereka' (Mahathir Mohamad: 1989). Mahathir menjelaskan bahwa: Asia kami secara intuitif memahami apa yang Cina coba lakukan. Kami secara intuitif memahami mengapa Cina melakukan apa yang sedang mereka coba lakukan. Kami secara intuitif memahami bagaimana keadaan Cina tentang seluruh proses merevolusi masyarakatnya dan membangun menuju tempat kebanggaan dan kemakmuran yang komprehensif bagi rakyatnya di abad kedua puluh satu Li Peng pada gilirannya memuji Malaysia tidak hanya atas keberhasilan pembangunan ekonominya strategi, tetapi terutama pada 'kebijakan luar negerinya yang netral dan tidak berpihak', pengamanannya terhadap prinsip-prinsip GNB, kepemimpinannya dalam upaya ASEAN untuk membangun zona damai di Asia Tenggara, dan promosi kerjasama Selatan-Selatan dan tatanan ekonomi Internasional Baru (See 'Li Toast Notes: 1990). Politisi Malaysia mengumumkan sejumlah proyek yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional. Namun, mereka berusaha keras untuk tidak menghubungkan pembangunan militer dengan masalah Spratly. Pada akhir tahun 1991, Menteri Pertahanan Malaysia Najib Razak mengumumkan bahwa Malaysia akan membangun landasan terbang di salah satu atol yang diduduki dan memasang peralatan militer di sana. Beberapa bulan kemudian, Malaysia dan Vietnam sepakat untuk bersama-sama mengembangkan bagian-bagian yang disengketakan daerah. Malaysia juga secara signifikan



memperluas kapasitasnya untuk produksi gas lepas pantai dan manufaktur dan pemuatan gas alam cair dengan memperluas Kompleks LNG di Bintulu (Sarawak) yang mulai memproduksi pada tahun 1983 (kebanyakan dikirim ke Jepang). Kompleks baru mulai beroperasi pada tahun 1995 (pengiriman ke Jepang, Taiwan, dan Korea). Gas dipasok dari ladang Central Luzonia terletak antara 125 dan 275 km lepas pantai.

Meskipun posisi/kebijakan Malaysia terhadap isu Laut Cina Selatan telah konsisten, kalibrasi ulang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan terkini/berlaku, secara internal dan eksternal. Upaya kalibrasi ulang telah tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Malaysia Tahun 2019, yang meliputi; *Pertama*, mempertahankan dan menegaskan klaim maritim Malaysia; *Kedua*, menjaga hubungan baik dengan Cina; *Ketiga*, mengimbangi kritik terhadap Cina dengan mempertanyakan aktivitas AS di wilayah tersebut. Malaysia menolak upaya Cina untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan melalui *one by one*, sebaliknya Malaysia memandang adanya peluang terhadap ASEAN melalui diantaranya melalui beberapa bentuk, yaitu Multilateral, *Track -1* (Resmi), *Track -2*, *Track -3* dan sebagai contoh jalur tidak resmi yaitu—Dialog Shangrila, dihadiri banyak orang, termasuk presiden, Menteri pertahanan, perwira militer, akademisi yang berurusan dengan keamanan dan pertahanan.

#### **2.4. Malaysia's Present and Future Strategy**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Malaysia dalam membangun kekuatan pertahanan melalui tiga upaya, yaitu menegaskan dan mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya, melindungi hubungan ekonomi dari sengketa Laut Cina Selatan, serta mendukung proses manajemen konflik. Kasus sengketa Laut Cina Selatan yang dimana juga terdapat beberapa wilayah yang menjadi kepentingan nasional Malaysia seperti kepulauan Spratley menjadi *focal point* dalam menjaga kedaulatan negara tersebut.

Dengan demikian, Laut Cina Selatan tampaknya menuju era konfrontasi angkatan laut yang mungkin akan melibatkan semua anggota ASEAN, secara



langsung atau tidak langsung. Alih-alih Laut Cina Selatan yang didominasi oleh kekuatan eksternal tunggal yang cenderung baik, yaitu Amerika Serikat dengan Cina sebagai kekuatan penyeimbang, peluang baru telah diciptakan bagi angkatan laut 'kekuatan menengah' untuk menegaskan diri mereka sendiri. Namun tidak seperti Samudera Hindia, yang kemungkinan besar akan menyaksikan hanya satu pemain dominan baru, situasi di Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan dapat berkembang menjadi 'yang jauh lebih kompleks, di mana akan ada pergeseran asosiasi negara-negara regional dengan negara-negara yang lebih besar. berbagai aktor eksternal. (Evans, 1989, p. 7)

Kompleksitas tersebut membawa Malaysia melakukan perubahan beberapa kebijakan strategis, guna menghadapi dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan. Upaya recalibrasi kebijakan yang dilakukan sejak 2018 nampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan. Nampaknya Cina ingin 'bermain-main' dengan dominasi Amerika Serikat dan Inggris yang juga punya hubungan mitra yang erat dengan negara tersebut. Konflik mengenai sengketa Laut Cina Selatan dilakukan dengan melakukan pendekatan analisa manajemen konflik strategis.

Sebuah studi telah dilakukan dengan menganalisa efektivitas mekanisme yang ada di ASEAN dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan dengan Cina. ASEAN disorot pada isu-isu tersebut serta mengkaji pendekatan Cina dalam menegaskan kedaulatan atas perairan yang disengketakan dan lebih jauh tanggapan negara-negara penuntut lainnya terhadap tindakan Cina. Secara umum, ASEAN menekankan bahwa sengketa wilayah harus diselesaikan di antara pihak-pihak terkait dan ASEAN mempertahankan faktor persekutuan yang esensial dalam pendiriannya dengan terus mengulangi komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan, serta kepedulian ASEAN untuk menjaga stabilitas regional, perdamaian dan kebebasan navigasi dan penerbangan (ASEAN, 2002; ASEAN, 2011a; ASEAN, 2012b; ASEAN, 2017a; ASEAN, 2017b; ASEAN, 2017c). ASEAN juga secara hati-hati mengarahkan posisi Cina melalui Daftar Pustaka



langsung atau tidak langsung dari Laut Cina Selatan atau Cina sendiri dalam pernyataan serta situasi di lapangan. Terkait sengketa tersebut, ASEAN juga telah menyediakan sejumlah platform untuk dialog dan kerjasama dengan menetapkan nilai dan norma bersama melalui berbagai instrumen seperti TAC 1976, dan dengan menyediakan mekanisme terpercaya seperti *ASEAN Plus One*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *East Asia Summit (EAS)*, *ASEAN Defense's Minister Meeting/ ASEAN Defense's Minister Meeting-Plus (ADMM/ADMM-Plus)* dan lokakarya *Track II*. Dalam hal ini, ASEAN berperan sebagai fasilitator apabila diundang oleh pihak-pihak terkait, sepanjang masih dalam batas-batas yang ditetapkan oleh kerangka ASEAN untuk pengelolaan konflik (Mustaza & Saidin, 2020, p. 584)

Selain itu, peran hegemoni Cina dan Amerika Serikat masih menjadi upaya 'penyeimbangan kekuatan' (*balancing of power*) dalam mengatur instrumentalisasi terhadap rivalitas politik global. Munculnya penyeimbangan kembali strategis Cina dan AS menghadirkan tantangan bagi organisasi, dan dapat merespons dalam empat cara yang sangat berbeda. Pertama, ASEAN dapat menjalankan keseimbangan kekuatan dan dapat menjadi objek persaingan kekuatan besar. Kedua, para skeptis regionalisme Asia Timur takut bahwa Cina pada akhirnya akan mendominasi Asia Timur melalui 'Komunitas Asia Timur' yang dipimpin Cina, meskipun Jepang awalnya mengusulkan inisiatif ini. Ketiga, Amerika Serikat memperluas naungan keamanannya dan memimpin kawasan secara ekonomi melalui forum multilateral. Terakhir, dari perspektif para peneliti ASEAN akan lebih memilih untuk menjaga 'sentralitas ASEAN' untuk menyeimbangkan dirinya antara Cina dan Amerika Serikat. Peneliti tersebut menghasilkan sebuah tesis yang menyatakan bahwa sebaiknya ASEAN memilih untuk mengambil skenario terakhir, dikarenakan upaya menjaga sentralitas ASEAN adalah pilihan strategis yang paling dapat diterima. Dengan melakukan hal tersebut, maka akan memajukan posisi strategisnya dan membantu menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional. (Sarith, 2013, pp. 1-2)



Sejalan dengan apa yang disampaikan dengan sebuah seminari yang dipaparkan oleh Professor Ruhanas, akademisi pertahanan dari Departemen Studi Strategik, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang menekankan perlunya upaya 'rekalibrasi' yang dimana tujuannya adalah menyesuaikan kebijakan negara Malaysia dengan dinamika lingkungan strategis yang terdapat di negara Malaysia. Rekalibrasi kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Najib pada tahun menyesuaikan dengan 2019 *Defence White Paper*, yang dimana peranan geopolitik yang mengalami pergeseran juga merubah konteks dari sengketa itu sendiri (Harun, 2021).

Malaysia telah memiliki beberapa kebijakan strategis dalam menangani sengketa di Laut Cina Selatan antara lain;

- 1) Menegaskan dan mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya (memperkuat kapabilitas pertahanan, penempatan personel militer di 5 pulau, Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TUDM), beserta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan patroli rutin di ZEE untuk memantau aktivitas Cina);
- 2) Melindungi hubungan ekonomi dari sengketa Laut Cina Selatan;
- 3) Mendukung proses manajemen konflik.

Kebijakan tersebut dilaksanakan pada era kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak, yang kemudian di-'rekalibrasi' pada tahun 2019 berdasarkan 2019 *Defence White Paper* (Harun, 2021)

Terdapat tiga 'tiga kebijakan rekalibrasi' yang sekiranya yang akan dilakukan oleh Malaysia di masa depan antara lain;

- 1) Mempertahankan dan menegaskan klaim maritim negara (akan terus menguasai 5 pulau karang tersebut, mendeklarasikan negara maritim—memberikan penekanan pada kepentingan ekonomi lingkungan maritim negara sebagaimana tercantum dalam DWP, dan mengusulkan peningkatan kemampuan maritim TLDM);
- 2) Menjaga hubungan baik dengan Cina;



- 3) Kritik yang berimbang terhadap Cina dengan mempertanyakan aktivitas AS di kawasan Laut Cina Selatan.

Ketiga 'rekalibrasi kebijakan strategis baru' menurutnya diharap akan membawa dampak yang signifikan terhadap kedaulatan maritime ASEAN, terutama bagi negara Malaysia (Harun, 2021).

Urgensi Laut Cina Selatan bagi Malaysia, secara ekonomi dan geopolitik serta menguraikan latar belakang wilayah yang disengketakan dan menyoroti asal usul klaim berdasarkan sejarah dan dasar hukum negara pengklaim. Hal yang menggarisbawahi bahwa mekanisme ASEAN yang ada termasuk lembaga-lembaga yang dipimpin ASEAN telah memainkan peran yang efektif dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan. ASEAN telah berhasil memfasilitasi keterlibatan kawasan dengan Cina, dan melunakkan kebijakan dan perilaku luar negeri Cina dalam sengketa dari diskusi bilateral yang ketat menjadi pendekatan multilateral. Sebagaimana tercermin dalam paparam sebelumnya, bahwa Cina bersikeras untuk menyelesaikan perselisihan secara bilateral dan menolak semua upaya untuk "menginternasionalkan" perselisihan dan keterlibatan pihak ketiga. Namun, mulai tahun 2000, Cina telah membuka diri terhadap ASEAN dan mulai aktif membahas masalah Laut Cina Selatan mulai tahun 2010. Meskipun Cina bersikeras pada klaimnya dalam semua keterlibatannya dengan ASEAN, tetapi faktanya adalah bahwa Cina bersedia untuk mengangkat masalah ini sama sekali, telah menunjukkan melemahnya sikap Cina dan pergeseran kebijakan luar negerinya untuk membahas perselisihan dalam platform multilateral. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina juga telah memulai upaya pembangunan bersama dengan ASEAN dan masing-masing negara penuntut melalui berbagai platform ASEAN. Partisipasi Cina dalam forum yang dipimpin ASEAN, seperti ADMM-Plus dan ARF telah melunakkan sikap Cina, sehingga lebih fleksibel dalam berkomitmen untuk melakukan pembicaraan dengan ASEAN mengenai masalah Laut Cina Selatan. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan ASEAN dalam sengketa telah meningkatkan kepercayaan, pemahaman dan saling percaya di antara pengklaim

Asia Tenggara dan Cina. Kawasan ini telah menjaga perdamaian dan stabilitasnya, dan mencegah konflik militer melalui berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN dan ASEAN termasuk TAC 1976, ADMM/ADMM Plus dan ARF.

### 3. Penutup

Konflik Laut Cina Selatan dimulai ketika Cina melakukan klaim 80 persen wilayah Laut Cina Selatan sebagai teritorinya meliputi gugus pulau Spratly dan Paracel. Klaim Cina ini menimbulkan tumpang tindih wilayah dengan negara-negara lain, salah satunya Malaysia. Malaysia mengklaim kedaulatan lebih dari sepuluh atol di kepulauan Spratly, yang semuanya termasuk dalam ZEE 200 mil laut (nm). Selain tumpang tindih wilayah, keterlibatan Amerika Serikat menyebabkan suasana konflik di Laut Cina Selatan menjadi semakin panas. Berbagai permasalahan ini menjadi sebuah isu bagi kepentingan nasional Malaysia di Laut Cina Selatan. Ancaman-ancaman bagi Malaysia datang dari segala arah. Malaysia sendiri memiliki elemen kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 1980 meliputi melindungi kedaulatan teritorial negara dan hak berdaulat dalam ZEE-nya, menegakkan hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi dan "*overflight*", dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Di satu sisi, ancaman-ancaman di Laut Cina Selatan semakin berkembang, namun di sisi lain Malaysia merupakan sebuah negara kecil yang masih berusaha membangun kekuatan militernya. Malaysia memiliki letak geografis yang berbatasan dengan negara lain sehingga dapat menjadi kelemahan dan kekuatan bagi Malaysia seperti potensi ancaman yang akan terjadi menjadi lebih banyak dan beragam serta ancaman bagi kepentingan nasional Malaysia jika terjadi instabilitas di kawasan. Cina merupakan salah satu ancaman terbesar di Laut Cina Selatan. Malaysia bukan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia sehingga Malaysia sangat mengandalkan perdagangan. Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Malaysia. Oleh karena itu Malaysia akan selalu berusaha menjaga hubungan sedekat mungkin dengan negara yang memiliki hubungan ekonomi dengannya, dan saat ini negara tersebut adalah Cina. Kedekatan Malaysia dengan Cina ini diharapkan dapat



meningkatkan *mutual trust* antara Malaysia dan Cina. Selain itu Malaysia juga menjalin berbagai upaya kerjasama politik dengan Amerika Serikat. Hal ini merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi dua kekuatan besar di Laut Cina Selatan dengan mengubah ancaman menjadi peluang.

Malaysia merupakan anggota ASEAN dan juga anggota FPDA. Malaysia berdiri bersama ASEAN dalam menentang klaim Cina dan mempromosikan berbagai upaya penyelesaian masalah melalui forum-forum multilateral seperti ADMM dan ADMM Plus. Malaysia tidak akan bisa melawan Cina *one on one* sehingga Malaysia membutuhkan organisasi multilateral seperti ASEAN. Mekanisme ASEAN yang ada termasuk lembaga-lembaga yang dipimpin ASEAN telah memainkan peran yang efektif dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan. ASEAN telah berhasil memfasilitasi keterlibatan kawasan dengan Cina, dan melunakkan kebijakan dan perilaku luar negeri Cina dalam sengketa dari diskusi bilateral yang ketat menjadi pendekatan multilateral. Selain itu, Malaysia juga memiliki dukungan dari negara-negara *Five Power Defence Agreements* (FPDA) yaitu Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris dimana Inggris merupakan negara “ibu” bagi Malaysia. Dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan, Malaysia tidak melakukan berbagai tindakan agresif dan mengandalkan berbagai upaya diplomasi namun Malaysia dengan tegas tidak menyetujui klaim Cina.



## Daftar Pustaka

- Akmal, & Pazli. (2016). Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014. *Journal of International Society Vol.3, No.1*, 1-13.
- Alam, S. (2017). Penentuan Strategi Bisnis Melalui Analisis SWOT Pada Barbershop di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar Volume 2 No 3 Juli-September 2017*, 303-312.
- ASEAN. (2002). Declaration of the Conduct of Parties in the South Cina Sea. ASEAN Secretariat. [https://asean.org/?static\\_post=declaration-onthe-conduct-of-parties-in-the-south-Cina-sea-2](https://asean.org/?static_post=declaration-onthe-conduct-of-parties-in-the-south-Cina-sea-2)
- ASEAN. (2011a). Chair's Statement of the 19th ASEAN Summit (18 November). ASEAN Secretariat. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/archive/documents/19th%20summit/CS.pdf>.
- ASEAN. (2012b). ASEAN's Six Point Principles on the South Cina Sea. ASEAN Secretariat. <https://www.asean.org/storage/images/AFMs%20Statement%20on%206%20Principles%20on%20SOUTH CINA SEA.pdf>
- ASEAN. (2017a). Chairman's Statement of the 20th ASEAN-Cina Summit (13 November). ASEAN Secretariat. <https://asean.org/storage/2017/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-the-20th-ASEAN-Cina-Summit-13-Nov-2017-Manila1.pdf>
- ASEAN. (2017b). Chairman's Statement of the 31st ASEAN Summit (16 November). ASEAN Secretariat. <https://asean.org/chairmans-statement-of-the-31st-asean-summit/>
- ASEAN. (2017c). Joint Communiqué of the 50th ASEAN Foreign Ministers' Meeting (5 August). ASEAN Secretariat. [https://asean.org/storage/2017/08/Joint-Communique-of-the-50th-AMM\\_FINAL.pdf](https://asean.org/storage/2017/08/Joint-Communique-of-the-50th-AMM_FINAL.pdf)
- Asmara, C. G. (2021, Februari 5). *Ini Sikap Resmi RI & Malaysia Soal Konflik Laut Cina Selatan*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205142813-4-221325/ini-sikap-resmi-ri-malaysia-soal-konflik-laut-Cina-selatan>





- Evans, G. J. (1989). *Australia's Regional Security: Ministerial Statement*. Canberra: Department of Foreign Affairs and Trade, Australia.
- Finkbeiner, J. M. (2013). *Malaysia's Great Power Balance and the South China Sea Disputes*. Philadelphia: United States Army War College.
- Harnisch, S. (2015). Role Theory and the Study of Chinese Foreign Policy'. In S. Harnisch, S. Bersick, & J.-C. Gottwald, *China's International Roles; Challenging or Supporting International Order?* New York/ London: Routledge.
- Harun, R. (2021, Juni 29). Malaysian Defence Diplomacy in the South China Sea : Issues and Challenges . (K. P. Pertahanan, Interviewer)
- Holsti, P. P. (1970). National Role Conception in Foreign Policy . *International Studies Quarterly* Volume 14 No 3 , 239.
- Keling, M. F. (2011). The Malaysian government's efforts in managing military and defence development. *International Journal of Business and Social Science*.
- Kreuzer, P. (2016). A Comparison of Malaysian and Philippine Responses to China in the South China Sea. *The Chinese Journal of International Politics*, 239-276.
- Kusumah, R. W., Supriatna, N., & Kusmarni, Y. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional : Pendekatan ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan. *FACTUM* Volume 7, No.2, 255-268.
- Marsetio. (2018). *Sengketa Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. Bogor: Universitas Perhatian.
- Mustaza, S. N., & Saidin, M. I. (2020). ASEAN, China and the South China Sea Territorial Disputes: Analysis of Conflict Management Strategies. *Intellectual Discourse*, 28(2), 577-598.
- News, B. (2011, Juli 21). *Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan*. Retrieved from [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict)
- Rosarians, F., & Pahlevi, A. (2013, Januari 30). *Diklaim Cina, Natuna Dikawal TNI*. Retrieved from <https://koran.tempo.co/read/nasional/299283/diklaim-cina-natuna-dikawal-tni>



- Roza, R., Nainggolan, P., & Muhamad, S. (2013). *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*. Jakarta: PD3I Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Sarith, H. (2013). ASEAN: between Cina and America. *East Asia Forum*, 1-4.
- Sonta, A. (2016). Regions and Power: The Structures of International Security Book Review. *Jurnal Keamanan Nasional Vol II No 1 Tahun 2016*.
- Storey, I. (2020). Malaysia and the South Cina Sea Dispute : Policy Continuity amid Domestic Political Change. *ISEAS Yusof Ishak Institute*, 1-10.
- Suresh, M. (2021, June 24). *South Cina Sea: After PLA Incursions, Malaysia Looking To Buy Combat Aircraft*. Retrieved July 6th, 2021, from <https://www.ibtimes.com/south-cina-sea-after-pla-incursions-malaysia-looking-buy-combat-aircraft-3234614>